

PERAN SATUAN TERITORIAL DALAM MENGHADAPI PERANG GENERASI KEEMPAT

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Perkembangan era globalisasi membawa dampak positif maupun negatif terhadap Bangsa dan Negara. Di satu sisi, dampak positif era globalisasi dianggap berkah karena kemajuan teknologinya telah dapat dinikmati warga dalam suatu negara. Di sisi lain, era globalisasi sering dicap membawa dampak negatif dimana era globalisasi ditopang oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang bebas tanpa filtrasi dapat mengancam persatuan dan ketahanan kultural Bangsa dan Negara. Di dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), era globalisasi dan kemajuan teknologi membawa dampak dengan bergesernya bentuk perang dari bentuk konvensional. Perang yang banyak terjadi saat ini sudah tidak lagi menjadikan negara sebagai objeknya, seperti perang melawan terorisme, fanatisme politik, premanisme dan *Cyber Warfare* adalah perang melawan sebuah konsep yang tidak berteritori, karakteristik perang di atas merupakan ciri dari perang generasi keempat.



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

b. TNI AD sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk dapat menjalankan tugas pokoknya dengan mengikuti perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah memaksimalkan fungsi satuan teritorial dalam penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan



semesta, hal ini yang menyebabkan TNI AD harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi tersebut, dimana satu dari peran satuan teritorial adalah menciptakan kekuatan

kewilayahan yang dapat diandalkan, sehingga secara nyata tercipta daya tangkal yang tangguh. Saat ini peran tersebut dirasa belum sejalan dengan dinamika perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi. Apabila kita lihat lebih cermat kondisi satuan teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat yang mempunyai karakteristik jauh berbeda dengan perang generasi sebelumnya sangat jelas terlihat bahwa kondisi satuan teritorial saat ini dirasakan belum siap. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, peran satuan teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat perlu dikaji untuk diadakan penyempurnaan, penataan secara bertahap dan terukur agar diperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tugas pokoknya.

c. Seskoad sebagai lembaga pengkajian strategis TNI AD memandang perlu membuat kajian tentang peran satuan teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat, sehingga kajian ini menjadi sebuah rekomendasi dalam

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

rangka penyiapan satuan teritorial menghadapi perang generasi keempat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Memberikan gambaran tentang peran satuan teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat.

b. Tujuan. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan TNI AD tentang peran satuan teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat.

3. Ruang Lingkup. Kajian ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

a. Pendahuluan.

b. Latar belakang pemikiran.

c. Data dan Fakta.

d. Analisa.

e. Penutup.

4. Metode dan Pendekatan.

a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata.

b. Pendekatan. Pembahasan naskah ini menggunakan pendekatan kepustakaan.

5. Pengertian.

a. Peran TNI AD. Berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, TNI AD berperan sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

b. Tugas TNI AD. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat.

c. Peran Binter. Binter TNI AD merupakan salah satu fungsi utama TNI AD, berperan sebagai alat utama tercapainya tugas pokok TNI AD. Peran Binter dilaksanakan secara terus menerus baik sebelum, selama dan sesudah ancaman.

d. Perang Generasi Keempat (4GW) merupakan peperangan asimetris dan non linier menggunakan seluruh sarana prasarana dan sistem senjata yang ditujukan terutama "menghancurkan" kemauan bertempur musuh, merupakan konsep baru yang berpijak pada sistem jaringan/*networked*, transnasional dan berbasis informasi.

e. Gelar kekuatan adalah sejumlah kekuatan TNI AD yang terdiri dari kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan dan kekuatan pendukung yang digelar matra darat dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman lawan.

f. Hakekat Ancaman adalah segala sesuatu yang mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia (yang merupakan Kepentingan Keamanan Nasional), baik dari segi sumber ancaman (ancaman dari dalam negeri, luar negeri dan azimuthal), dari segi macam ancaman (ancaman militer atau nir militer), maupun dari segi aktor ancaman (ancaman suatu negara atau bukan negara).

g. Perang *Cyber* (*Cyber Warfare*). Perang *Cyber* memerlukan teknik untuk menghancurkan, menurunkan kemampuan, mengeksploitasi atau kompromi sistem berbasis komputer musuh.

BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. Umum. Salah satu konsep Clausewitz yang dikenal dalam istilah *The Trinity of war* adalah sebuah konsep yang menjelaskan hubungan saling ketergantungan yang tetap antara tiga variabel utama dalam perang yaitu rakyat, militer dan pemerintah dimana kemenangan hanya dicapai bila ketiga variabel di atas dapat diruntuhkan secara bersamaan. Bangsa Indonesia di awal kemerdekaan dengan semangat perlawanan antara tentara dan rakyat yang saling membantu, didukung oleh upaya diplomasi telah berhasil mengembalikan Indonesia menjadi sebuah Negara yang berdaulat.

Pada saat ini pola peperangan yang berkembang telah bertransformasi bentuk maupun cirinya dengan indikasi terdapatnya aktor Negara dan bukan Negara yang berperan dan berusaha melemahkan kekuatan Indonesia dari dalam negeri secara perlahan namun pasti, karenanya perlu mengantisipasi munculnya ancaman yang timbul dengan meningkatkan pertahanan negara. Sishankamrata yang dinyatakan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 30 dan UU RI No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan seluruh sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman-ancaman. Ancaman baru terhadap pertahanan yang sudah



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

memasuki fase baru yang biasa disebut perang generasi keempat (*Fourth Generation Warfare*) menuntut adanya strategi pertahanan dan keamanan negara yang tepat untuk mengamankan dan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.

Pembinaan Teritorial TNI AD pada hakikatnya merupakan kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat, melalui peran satuan teritorial dengan menciptakan kekuatan kewilayahan yang dapat diandalkan, sehingga secara nyata tercipta daya tangkal yang tangguh untuk melindungi dan mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pembahasan lebih komprehensif dan utuh, maka dalam kajian ini dilandasi oleh landasan historis, landasan filosofis, landasan operasional dan landasan teori serta dasar pemikiran yang akan mengantar pada pokok bahasan.

7. Landasan Historis. Perjalanan sejarah lahirnya TNI yang berasal dari rakyat, senantiasa konsisten dan konsekuen terhadap komitmen menjaga keselamatan bangsa, menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan NKRI dari setiap hakikat ancaman yang timbul, hal ini dapat dilihat dari masa perjuangan TNI



dalam setiap periodik sejarah perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa perjuangan fisik merebut kemerdekaan sampai masa perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Perkembangan dinamika perjalanan demokrasi di Indonesia masa orde baru,

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

ABRI secara langsung terlibat dalam kehidupan politik praktis yang menyebabkan kesalahan dalam penerapan Dwi Fungsi ABRI, dimana ABRI telah berperan ganda yaitu melaksanakan peran dan fungsi sebagai sebagai alat negara di bidang Hankam dan di lain sisi, ABRI menjalankan peran dalam kehidupan sosial politik. Seiring pengaruh globalisasi dunia menyangkut isu demokratis telah membangkitkan kesadaran politik yang demokrat, yang diwujudkan melalui reformasi mengakibatkan ABRI menjadi sasaran kesalahan dan pada akhirnya eksistensinya menjadi terpuruk. Sejalan dengan kejadian di atas, maka saat ini dan kedepan TNI harus mampu tampil secara profesional dan proporsional sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai alat negara di bidang pertahanan sesuai dengan jati dirinya yang telah diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang Peran TNI.

8. Landasan Filosofis.

a. Landasan Idiil. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia diyakini telah mampu mempertahankan dan mempersatukan bangsa Indonesia Dalam wujud kebhinekaannya sebagai manusia Indonesia yang beragama dan

bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki budi pekerti yang luhur, bermartabat, beradab, bersatu padu sebagai sesama warga bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah serta senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Peran satuan teritorial yang dijiwai oleh Pancasila adalah untuk menciptakan kekuatan kewilayahan yang dapat diandalkan guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional.



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

b. Landasan Konstitusional. Pembukaan UUD'45 pada alenia keempat menyatakan pemerintah negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mengamanatkan kepada TNI khususnya TNI AD untuk menjaga kedaulatan NKRI di darat dari berbagai ancaman. Sebagai komponen utama dalam Sishanta, TNI AD berperan sebagai penindak awal pada jajaran terdepan dengan gelar satuannya didukung seluruh komponen pertahanan darat lainnya dalam menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di wilayah darat.

9. Landasan Operasional.

a. Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang-undang ini sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional



lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dipersiapkan diartikan sebagai pengelolaan pertahanan yang salah satu wujudnya menata ruang wilayah nasional beserta komponen-komponen pertahanan lainnya menjadi Kompartemen Wilayah Pertahanan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

b. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dan profesional, hal ini yang harus dikoordinasikan lebih rinci oleh Komando Kewilayahan dalam membantu Pemda untuk pengembangan dan penataan Kompartemen Wilayah Pertahanan di masa yang akan datang dengan penyempurnaan produk-produk komando kewilayahan secara serasi, selaras dan terpadu dengan program pembangunan daerah.

c. Undang-undang RI No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 7 Undang-undang TNI No. 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka untuk itu dibutuhkan TNI yang kuat, solid, tangguh dan profesional untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedang tugas TNI AD sebagai bagian integral dari TNI sesuai yang tertuang dalam pasal 8 UU RI No. 34 tahun 2004 adalah melaksanakan



tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan

kekuatan-kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

d. Keputusan Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Binter, merupakan landasan dan pedoman bagi satuan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.

10. Landasan Teori.

a. Dalam membangun Sishanneg yang diharapkan mampu melaksanakan fungsinya secara efektif sesuai dengan kondisi yang dimiliki Indonesia maka tiga doktrin utama yang dimiliki tetap dapat dipakai sebagai pijakan berupa Sishanta, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang secara umum bahwa upaya pengembangan sistem pertahanan negara di Indonesia harus memperhatikan tiga faktor utama, yaitu pertama faktor geo strategi (internal maupun eksternal), kedua faktor perubahan internasional, ketiga faktor gelar operasi militer guna memenangkan perang.¹

b. Peran Binter TNI AD. Dalam perspektif kegiatan, pembinaan teritorial TNI AD memiliki peran sebagai salah satu kegiatan utama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD dalam sistem pertahanan Negara.

c. Hukum Huntington. Menurut Samuel Huntington, dengan teori *clash of civilization* dimana masa yang akan datang dalam abad 21 ini seperti diprediksi Huntington akan terjadi konflik atau perselisihan konflik-konflik dalam peradaban dunia, baik itu konflik antar budaya, antar timur

¹ Anwar, Dewi Fortuna, 2000." Wawasan Masa Depan tentang Sishankamneg (5-10 Tahun ke Depan), hal 12.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

barat, antar agama, etnik, konflik perbatasan antar Negara dan sebagainya.²

11. Dasar pemikiran. Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis terdapat kemungkinan ancaman aspek darat ke depan yang merupakan ancaman faktual maupun potensial, berupa ancaman militer dan ancaman nir militer. Ancaman invasi militer oleh negara kuat dapat terjadi setiap saat manakala kepentingan negara kuat tersebut di Indonesia terancam. Di lain sisi keberadaan sementara kekuatan angkatan bersenjata negara asing dalam wilayah NKRI yang telah disepakati melalui suatu perjanjian untuk kegiatan penanggulangan bencana, latihan bersama dan kunjungan persahabatan memiliki kerawanan menjadi sarana pengumpulan data bagi kepentingan mereka. Ancaman nir militer berupa gerakan separatis bersenjata, aksi radikal, aksi terorisme, kerusuhan sosial, bencana alam dan konflik komunal yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan merupakan ancaman faktual.

Seiring dengan perkembangan global di era globalisasi tidak menuntut kemungkinan adanya perang yang menggunakan peperangan asimetris dan non linier yang menggunakan semua jaringan yang tersedia, baik idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer,



yang ditujukan untuk menghancurkan kemauan bertempur musuh. Perang generasi keempat menuntut adanya pelibatan semua komponen bangsa untuk terlibat dan saling bahu membahu memenangkan perang di segala sektor. Pelibatan warga negara merupakan suatu syarat mutlak. Dalam memperkuat pertahanan tidak terbatas pada pria saja, tetapi wanita juga

² Samuel Huntington, teori *clash of civilization*.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

mendapat kewajiban yang sama. Kepentingan negara dalam melibatkan seluruh warga negaranya dalam pertahanan negara, tidak hanya untuk kepentingan perang tetapi kebijakan negara dalam melibatkan warga negara dan komponen kekuatan negara, selama masa damai lebih ditujukan untuk membiasakan seluruh warga negaranya agar bersikap disiplin, tertib, toleransi dan terutama cinta tanah air. Dengan menanamkan sikap ini, negara dapat menilai dan mengukur sampai sejauh mana jiwa nasionalisme warga negaranya dalam mempertahankan negara. Penyiapan warga Negara sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan Negara haruslah dilaksanakan dengan memaksimalkan peran satuan teritorial, dimana peran ini hendaknya dilakukan secara bersinergi dengan unsur-unsur lain di wilayah tersebut sehingga akan tercipta kekuatan kewilayahan yang dapat diandalkan guna terbentuknya daya tangkal yang tangguh dalam menghadapi dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkembangan lingkungan strategis di Indonesia, serta perubahan karakteristik perang yang telah bertransformasi menjadi perang generasi keempat.

BAB III DATA DAN FAKTA

12. Umum. Peran satuan teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat masih perlu untuk ditata dan dibenahi kembali. Artinya bahwa, bila dicermati peran dan kekuatan satuan teritorial yang tergelar saat ini dihadapkan perkembangan wilayah dengan karakteristik perang generasi keempat dan ancaman yang akan dihadapi dirasakan belum siap. Kondisi ini, menyebabkan satuan teritorial harus ditata kembali. Oleh karenanya, upaya mengoptimalkan peran satuan teritorial dalam menghadapi perang generasi keempat akan diuraikan lebih lanjut.

13. Karakteristik. Di dalam perkembangannya bentuk atau karakteristik perang selalu berubah dan bertransformasi sesuai dengan keadaan, kebutuhan serta kemampuan dari para *participants* yang terlibat langsung dalam perang tersebut, sejarah telah mencatat 3 generasi perang yang ada sebelum terjadinya perang generasi ke 4, dibawah ini akan dijelaskan karakteristik perang sampai dengan perang generasi keempat menurut Doktrin Tentara Nasional Indonesia "Tri Dharma Eka Karma" yaitu:

- a. Peperangan generasi Pertama (1GW) sangat mengandalkan kekuatan manusia, menggunakan senapan laras licin (*smoothbore*) dan berada di daerah pertempuran yang berupa lapangan (medan terbuka) di luar pemukiman penduduk (*no man's land*) dengan taktik bersyaf dan berbanjar. Mengacu pada



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

tahap awal dari pengorganisasian dan pengendalian Angkatan Bersenjata oleh Negara yang mengobarkan peperangan. Peperangan Generasi pertama ini juga disebut sebagai perang Napoleon, yaitu pengerahan kekuatan tentara suatu Negara melawan kekuatan tentara Negara lain dalam hubungan besar dan mempergunakan formasi kolom. Generasi peperangan pertama ini merupakan hasil dari revolusi industri dan perbaikan kuantitatif dan kualitatif dari daya tembak massal. Contoh peperangan generasi pertama yaitu perang sipil Inggris, perang anglo Spanyol, perang revolusioner Amerika, perang Napoleon, perang tahun 1812 (invasi Perancis ke Rusia) dan perang kemerdekaan Meksiko.

b. Peperangan generasi kedua (2GW) berbagai taktik dan strategi yang digunakan dalam peperangan generasi ini merupakan respon atas perkembangan revolusi senjata (senapan dan meriam) yang memiliki kerapatan tembakan dan memiliki jarak tembak yang efektif lebih jauh daripada senjata yang digunakan pada peperangan generasi pertama. Taktik yang digunakan menggunakan kombinasi dari tembakan dan gerakan (tembak gerak). Gerakan dalam serangan masih mengadakan kesejajaran (bersyaf) dan



bantuan tembakan lintas lengkung (meriam), namun lebih mengutamakan gerakan melambung untuk merebut dan menduduki sasaran. Generasi peperangan kedua merupakan perkembangan

dari peperangan generasi pertama, terutama sebagai akibat dari perkembangan teknologi sistem persenjataan yang terus berkembang dan ditemukannya senjata mesin dan senjata tembakan tidak langsung serta taktik peperangan yang menggunakan parit. Contoh peperangan generasi kedua yaitu

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

perang sipil di Amerika, Perang Boer, Perang Dunia I dan Perang Sipil di Spanyol.

c. Peperangan generasi ketiga (3GW) merupakan pengembangan dari generasi peperangan generasi kedua namun sudah menggunakan taktik dan manuver yang didukung keunggulan mobilitas, bantuan tembakan yang masif dengan tahapan serangan tidak selalu jelas (linier) dan banyak mengandalkan keunggulan teknologi persenjataan serta teknologi informatika. Hal ini mengacu kepada taktik peperangan manuver yang dimiliki oleh Jerman pada perang Dunia Pertama, kemudian diperkenalkan pada permulaan Perang Dunia Kedua oleh angkatan Bersenjata Jerman ketika menguasai Eropa. Strategi ini dicapai dengan penyempurnaan lebih lanjut terhadap berbagai teknologi yang telah ada pada saat itu dan ditandai dengan pelaksanaan operasi yang mengkombinasikan kekuatan Darat, Laut dan Udara. Peperangan Generasi Ketiga ini telah menjadi bentuk dominan dari peperangan militer konvensional antara negara-bangsa, termasuk Amerika Serikat. Contoh Peperangan Generasi Ketiga yaitu Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang teluk dan Invasi Irak tahun 2003.



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

d. Peperangan Generasi Keempat (4GW) merupakan peperangan asimetris dan non linier menggunakan seluruh sarana dan prasarana dan sistem senjata yang ditujukan terutama untuk “menghancurkan” kemauan bertempur musuh. Merupakan konsep baru yang berpijak pada sistem jaringan/*networked*, transnasional dan berbasis informasi. Munculnya Generasi Peperangan Keempat tidak terlepas dari perubahan struktur dan kultur masyarakat di dunia pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknik yang mempengaruhi sifat alamiah dari perang.

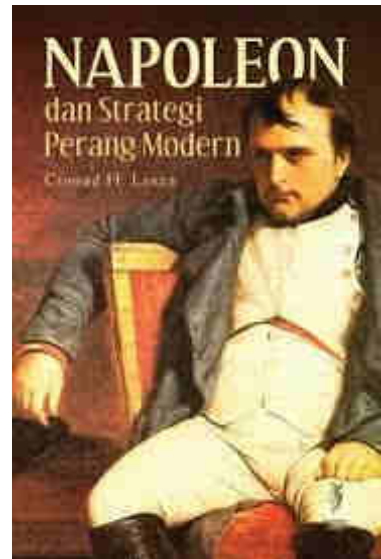


Peperangan generasi ini menggunakan semua jaringan politik, ekonomi, sosial dan militer yang tersedia untuk langsung menyerang keinginan/niat pemimpin politik musuh. Sasarannya adalah untuk secara langsung mengubah pemikiran para pembuat kebijakan musuh. Konsep dasar dari peperangan generasi keempat ini adalah keinginan politik yang lebih kuat akan dapat mengalahkan kekuatan ekonomi dan militer yang lebih besar. Dengan kata lain, peperangan generasi keempat karakteristiknya bersifat politis, berlarut (*Protracted*) dan jaringan (*Networked*). Peperangan ini diterapkan oleh Osama Bin Laden di Irak dan Afghanistan serta kelompok Hezbollah di Lebanon.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Sedangkan menurut Profesor Muladi (mantan Gubernur Lemhanas) karakteristik perang sebelum ke perang generasi keempat adalah:

a. Generasi perang ke I modern terjadi antara 1648-1860. Perang ini merupakan perang dalam barisan dan lajur, dimana perang dilakukan secara formal dan medan perang yang tertib dan rapi serta linier. Hal ini dikaitkan dengan kultur militer yang penuh keteraturan. Hal-hal yang membedakan antara orang sipil dan militer seperti pakaian seragam, pemberian hormat dan pangkat, pada dasarnya merupakan produk Generasi I ini dan dimaksudkan untuk menegakkan budaya ketertiban. Generasi I ini didominasi oleh "*massed manpower*" seperti yang terjadi dalam perang Napoleon.



b. Generasi perang ke II dikembangkan oleh Tentara Perancis, selama Perang Dunia I, dengan mengedepankan daya tembak atau "*mass firepower*" yang sebagian besar memanfaatkan tembakan meriam tidak langsung. Doktrin yang dikembangkan adalah "*The artillery conquers, the cavalry as the attacker and the infantry occupies*". Daya tembak yang terkendali secara terpusat dan hati-hati disinkronisasikan dengan menggunakan rencana yang khusus, terperinci dan teratur bagi infanteri, tank dan artileri dimana komandan sangat memegang peranan.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

c. Generasi perang ke III yang sebenarnya juga merupakan produk PD I dikembangkan oleh Tentara Jerman dalam PD II yang dikenal secara luas sebagai "*Blitzkrieg*" atau perang dengan manuver, didasarkan atas daya tembak dan menghabiskan tenaga lawan (*attrition*), tetapi mengutamakan kecepatan, daya dadak dan kekuatan mental serta fisik. Sebagai pengganti doktrin "*close with and destroy*" motto yang lain yang dikembangkan adalah "*bypass and collapse*". Generasi ketiga ini bersifat "*non-linear*". Ketertiban menentukan hasil yang akan dicapai, tetapi tidak menentukan cara, inisiatif lebih penting daripada ketaatan.

d. Selanjutnya desentralisasi dan inisiatif yang berasal dari generasi ketiga diambil alih oleh Generasi perang ke IV, yang sangat menonjol dalam Generasi IV ini adalah perubahan radikal terhadap norma yang dihasilkan oleh perjanjian Westphalia 1648 bahwa negara adalah yang memonopoli perang, karena di seluruh dunia militer negara dalam generasi ini bertempur dengan "*non-state opponents*", seperti Al Qaeda dan organisasi-organisasi teroris lain. Dalam generasi ini sebenarnya yang terjadi adalah berulangnya budaya perang di masa lalu dimana yang terlibat konflik bukanlah negara, tetapi keluarga, suku, penganut agama, kota, dunia usaha yang menggunakan segala cara. Generasi keempat ini mengembangkan apa yang dinamakan "*insurgency*", bersifat asimetrik yang mendayagunakan segala jaringan yang tersedia idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer untuk meyakinkan pengambil keputusan musuh bahwa tujuan strategis mereka tidak dapat dicapai atau sangat mahal. (Lind, 2007). Karakter lain adalah bersifat trans nasional, tidak mengenal "*battlefield*" yang pasti, tidak membedakan sipil dan militer, tidak mengenal masa perang dan damai, tidak mengenal "*front-line*" dan bergerak melalui kelompok-kelompok kecil. Contohnya adalah terorisme. Lebih jauh lagi karakteristik

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

peperangan generasi keempat ditandai dengan cara mengaburkan garis antara perang dan politik, tentara dan sipil. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1989 oleh tim analis Amerika Serikat, termasuk William S. Lind, untuk menggambarkan kembalinya perang terhadap bentuk desentralisasi. Dalam hal perang generasi modern, perang generasi keempat didefinisikan secara sederhana yaitu setiap perang dimana salah satu peserta utama kekerasan adalah bukan Negara melainkan aktor non-Negara.

Peperangan generasi keempat adalah konflik yang melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Bersifat kompleks dan jangka waktu yang panjang.
- 2) Terorisme (dengan taktik meneror).
- 3) Sangat desentralisasi atau menyebar di daerah-daerah.
- 4) Menyerang langsung terhadap budaya suatu Negara.
- 5) Perang psikologis yang sangat canggih, terutama melalui manipulasi media dan perang tentang kelemahan hukum.
- 6) Menekan ke semua sendi Negara seperti: idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer.
- 7) Terjadi dalam konflik intensitas rendah, yang melibatkan aktor dari semua jaringan.
- 8) Mempergunakan aktor non-kombatan sehingga membuat dilema dalam taktik.
- 9) Tidak adanya hirarki.
- 10) Dalam skala/intensitas yang kecil, dengan menyebar jaringan komunikasi dan adanya dukungan keuangan.
- 11) Penggunaan *Insurgency* dan taktik gerilya.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

14. Peran Satuan Teritorial Saat Ini. Strategi Pertahanan Negara yang bersifat semesta dilaksanakan dengan melibatkan



seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan

negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman, dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP dilaksanakan dalam rangka menghadapi ancaman militer berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, sabotase dan spionase dari negara lain, dimana TNI sebagai komponen utama,³ dengan strategi penangkalan dan pertahanan berlapis meliputi Palagan Luar, Palagan Utama dan Palagan Dalam. Apabila musuh telah berada pada Palagan Dalam, dilaksanakan pertahanan wilayah dan perang berlarut (perlawanan wilayah) dengan serangan balas untuk mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia.⁴ Dalam pertahanan wilayah dan perang berlarut (perlawanan wilayah) sampai dengan serangan balas, TNI AD berperan sebagai Benteng Terakhir Pertahanan Negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.

³ Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Amandemen keempat UUD RI 1945 pasal 11 point (1); dan Penggunaan kekuatan TNI pada OMP dilakukan setelah ada pernyataan perang yang dikeluarkan oleh Presiden melalui mekanisme pengambilan keputusan politik negara. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Hal 56.

⁴ Strategi pertahanan berlapis dilaksanakan dalam bentuk pertahanan mendalam yang disusun dalam bentuk palagan luar, palagan utama dan palagan dalam. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Hal 57-58

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

OMSP dilaksanakan untuk membantu atau mendukung Pemerintah dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer di darat dari dalam negeri berupa separatis bersenjata, aksi radikal, pemberontakan bersenjata, terorisme, kerusuhan sosial, konflik komunal, bencana alam dan ancaman lain berdasarkan keputusan politik negara. Peran Pem-binaan Teritorial TNI AD dalam perspektif kegiatan, memiliki peran sebagai salah satu kegiatan utama dalam pemberdayaan wilayah per-tahanan di darat dan mewujudkan keman-unggalan TNI-Rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD dalam sistem pertahanan negara. Pembinaan Teritorial TNI AD diarahkan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan potensi wilayah melalui Pembinaan Kemampuan Teritorial, Perlawanan Wilayah, Komunikasi Sosial dan Bhakti TNI yang berfungsi sebagai :



- a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang dipersiapkan secara dini yang meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

d. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, merehabilitasi infra struktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.

e. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat.

Kekuatan kewilayahan yang berada di setiap kompartemen strategis pertahanan matra darat disiapkan untuk mampu beroperasi di wilayah secara mandiri sebagai penindak awal dan berkelanjutan di wilayah kompartemen sendiri. Kompartemen strategis pertahanan matra darat menjadi pilihan yang efisien dan efektif apabila dihadapkan kepada keterbatasan kemampuan



ekonomi negara saat ini, untuk membangun kekuatan militer yang besar dengan sarana dan prasarana berbasis teknologi yang dapat di mobilisasi untuk melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mencermati pengalaman Inggris dalam perang Malvinas, *British Task Force* yang dibentuk dengan sarana dan prasarana militer berbasis teknologi, tidak dapat melaksanakan operasi jarak jauh atau langsung dari Inggris ke kepulauan Malvinas yang berjarak 7.000-8.000 mil dari Inggris. Masih diperlukan dukungan masyarakat dan pangkalan aju di pulau Ascention milik Amerika Serikat yang berjarak 3.800 mil dari Malvinas. Dukungan rakyat diwujudkan antara lain dalam bentuk merubah kapal konvensional, menjadi kapal rumah sakit dan kapal pengangkut pasukan maupun logistiknya. Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, maka menjadi tidak etis apabila kita

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

memaksakan diri untuk mengganti strategi pertahanan negara yang bersifat semesta dengan sistem pertahanan yang hanya mengandalkan teknologi maju. Mengingat saat ini kebutuhan mengatasi kemiskinan masih menjadi prioritas utama negara dari pada harus membangun TNI seperti angkatan bersenjata negara maju.

Implementasi strategi pertahanan nusantara dalam bentuk kompartemen strategis di samping sebagai penindak awal dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri juga bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), dengan menggunakan totalitas kekuatan dan potensi nasional yang dimiliki masing masing wilayah.⁵

Penataan kompartemen strategis dilakukan dalam rangka penyiapan aspek geografi, demografi dan kondisi sosial, menjadi Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Juang melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dengan menggunakan metode pembinaan teritorial karena pada hakekatnya pembinaan teritorial adalah mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat dan kemanunggalan tersebut merupakan dukungan terhadap TNI AD dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.



⁵ Kodiklat TNI AD, *Kodam sebagai Kompartemen Strategis Pertahanan Sishanta*, Bandung, hal. 23

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

15. Gelar Satuan Teritorial Saat Ini. Satuan kewilayahan yang ada saat ini berada tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan rincian seperti tabel di bawah ini:

LOKASI UNIT TAWAN SAMPUNG BERKUALITAS																
No	KORAN	SAT KAWAL								SAT BOK KAWAL						
		MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL	MAK KAWAL KAWAL
1	MAK	5	31	354	3	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	MAK	5	37	241	3	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	MAK	4	34	389	4	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	MAK	4	38	381	4	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	MAK	4	33	381	4	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	MAK	4	27	381	2	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	MAK	5	38	354	3	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	MAK	5	26	381	3	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	MAK	4	33	381	2	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	MAK	2	8	67	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	MAK	4	33	381	4	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	MAK	3	38	381	2	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	MAK	5	8	87	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL		44	254	3428	44	254	10	9	95	9	10	11	1	5	11	12

16. Ancaman yang dihadapi. Berdasarkan perkiraan ancaman jangka pendek dari Spamad dan Perkiraan Intelijen Strategis Jangka Pendek dari BAIS TNI ancaman yang akan timbul maupun kemungkinan terjadi di wilayah Indonesia, antara lain :

- Ancaman agresi. Berdasarkan fakta yang ada, ancaman agresi berupa invasi militer negara asing ke wilayah Indonesia kemungkinan kecil terjadi.
- Ancaman Separatis. Ancaman separatis bersenjata. Berdasarkan fakta yang ada maka potensi ancaman separatis bersenjata kemungkinan dapat terjadi. Indikasinya masih terdapat senjata api dan bahan peledak yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat serta adanya upaya penyusupan dari

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

kelompok kepentingan dalam dan luar negeri. Ancaman separatis ini kemungkinan masih dapat terjadi seperti:

- 1) Ancaman Gerakan Separatis Bersenjata Papua (GSBP).
- 2) Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS).
- 3) Eks GAM/KPA.



c. Ancaman terorisme. Berdasarkan fakta yang ada, aksi terorisme kemungkinan besar dapat terjadi oleh kelompok radikal dengan sasaran yang bervariasi baik perusahaan-perusahaan serta perkantoran milik negara asing dan sekutunya yang dinilai tidak sepaham dengan keyakinannya, tempat berkumpul warga asing, kepala negara dan pejabat pemerintah, tamu negara, obyek vital nasional serta fasilitas asing terutama milik AS dan sekutunya di Indonesia. Aksi teror kemungkinan terjadi di Provinsi Aceh, Kota Medan, Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Sulsel, Poso dan Ambon.

d. Ancaman keamanan wilayah perbatasan. Secara kelembagaan, penanganan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga masih dilakukan secara parsial dan bersifat *ad hoc*, melalui pembentukan komite yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dua negara dan belum dikelola suatu lembaga khusus. Penanganan permasalahan perbatasan dengan negara lainnya tidak melalui forum khusus, namun melalui pertemuan-pertemuan bilateral. Dalam penanganan perbatasan ini, terdapat 3 (tiga) negara yang memiliki/forum bersama dengan Indonesia diantaranya negara Malaysia, Timor Leste dan PNG. Komite-komite tersebut antara lain:

- 1) *General Border Committee (GBC)* RI-Malaysia, diketuai Panglima TNI.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

- 2) *Joint Border Committee (JBC)* RI-Papua Nugini, diketuai Mendagri.
- 3) *Joint Border Committee* RI-RDTL, diketuai Dirjen PUM Depdagri.
- 4) *Joint Border Committee RI-Malaysia (JCM)*, diketuai Departemen Luar Negeri yang bersifat kerja sama bilateral.



Meskipun komite bersama ini telah melaksanakan berbagai kegiatan terutama yang mengarah kepada pembangunan kedua wilayah perbatasan dengan diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi untuk mendukung terciptanya wilayah perbatasan yang aman dan tertib. Namun demikian potensi untuk terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wilayah perbatasan masih sangat terbuka, mengingat panjangnya wilayah perbatasan maupun kondisi medan yang terjal di beberapa bagian wilayah tersebut sehingga tidak semua tempat/perbatasan dapat diawasi dengan baik. Adapun perkiraan ancaman keamanan wilayah perbatasan yang mungkin terjadi seperti : *human trafficking, illegal logging, smuggling, drug trafficking, trans national crime, illegal fishing, illegal mining* dan pergeseran patok perbatasan.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

e. Ancaman keamanan obyek vital strategis. Sabotase dan aksi terorisme kemungkinan terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak dari dalam maupun luar negeri seperti di Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Babel, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kaltim, Sulsel dan Papua.

f. Ancaman keamanan VVIP. Ancaman keselamatan dan keamanan Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya serta



tamu negara setingkat kepala negara kemungkinan besar dapat terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain unjuk rasa, sabotase oleh kelompok tertentu dengan berbagai bentuk kegiatan maupun aksi terorisme.

g. Ancaman konflik komunal yang bernuansa SARA, sengketa Pemilukada dan batas wilayah, perang antar Kelompok preman serta konflik antar Ormas kemungkinan besar dapat terjadi, di wilayah Aceh, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sulteng, Maluku, Papua, Kalteng, NTB, Bali dan NTT.

h. Ancaman bencana alam. Kebakaran hutan, bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan tsunami kemungkinan besar dapat terjadi di daerah rawan bencana alam antara lain : Aceh, Sumut, Padang, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, NTB, NTT, Ambon dan Papua Barat.

i. Ancaman Nir militer. Ancaman nir militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nir militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nir militer diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ancaman Berdimensi Ideologi.
- 2) Ancaman Berdimensi Politik.
- 3) Ancaman Berdimensi Ekonomi.
- 4) Ancaman Berdimensi Sosial Budaya.
- 5) Ancaman Berdimensi Teknologi dan Informasi.
- 6) Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum



BAB IV ANALISA

17. Umum. Era globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam suatu proses perubahan yang tercermin dengan banyak terjadinya perubahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan. Proses perubahan yang terjadi dapat memicu terjadinya pergeseran identitas nasional kedalam ikatan yang lebih spesifik seperti budaya, agama, etnis dan lain-lain yang pada akhirnya mengarah kepada terbentuknya identitas baru yang dalam banyak kasus di negara lain telah menyebabkan terjadinya konflik komunal bahkan konflik kepentingan antar negara. Sesuai dengan tugas pokoknya, TNI AD melalui satuan kewilayahannya dituntut untuk dapat menjawab tantangan era globalisasi dengan meningkatkan peran satuan teritorial sehingga dapat menjawab tantangan tersebut.



Karena itu perlu dilakukan suatu analisa yang mendalam terhadap karakteristik perang generasi keempat, peran, gelar satuan dan ancaman yang mungkin timbul sehingga dapat diambil kesimpulan yang berharga gunaantisipasi perubahan Globalisasi yang terjadi.

18. Ditinjau dari Aspek karakteristik. Ditinjau dari aspek karakteristik, perang generasi keempat sangat berbeda dengan karakteristik perang generasi sebelumnya seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Tabel 1.IV. Karakteristik Perang Generasi I – Generasi IV

No.	Generasi	Perang I	Perang II	Perang III	Perang IV
1	Perang	1914-1918	1939-1945	1945-1990	1990-sekarang
2	Bentuk	Perang konvensional	Perang konvensional	Perang konvensional	Perang asimetris
3	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
4	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
5	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
6	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
7	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
8	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
9	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
10	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
11	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
12	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
13	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
14	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
15	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
16	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
17	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
18	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
19	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
20	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
21	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
22	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
23	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
24	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
25	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
26	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
27	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
28	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
29	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
30	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
31	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
32	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
33	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
34	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
35	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
36	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
37	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
38	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
39	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
40	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
41	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
42	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
43	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
44	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
45	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
46	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
47	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
48	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
49	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
50	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
51	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
52	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
53	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
54	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
55	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
56	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
57	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
58	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
59	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
60	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
61	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
62	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
63	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
64	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
65	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
66	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
67	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
68	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
69	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
70	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
71	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
72	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
73	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
74	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
75	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
76	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
77	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
78	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
79	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
80	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
81	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
82	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
83	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
84	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
85	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
86	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
87	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
88	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
89	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
90	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
91	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
92	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
93	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
94	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
95	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
96	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
97	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
98	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
99	Tempat	Front	Front	Front	Non-front
100	Tempat	Front	Front	Front	Non-front

Dengan melihat tabel di atas dapat diambil gambaran umum bahwa transformasi karakteristik perang sangat berpengaruh terhadap sistem pertahanan yang harus diterapkan oleh suatu Negara sebagai bagian untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, dimana pada perang generasi keempat bentuk perang yang dilaksanakan adalah tanpa front yang maksudnya perang tersebut tidak mengenal medan pertempuran yang formal atau pasti dengan sifatnya yang non-linier dan asimetrik dan menggunakan taktik dengan mendayagunakan segala jaringan yang tersedia seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer.

Dengan bercermin dari pengalaman perang generasi keempat yang pernah terjadi di Negara lain seperti Afganistan (2001-sekarang) dan Suriah (2010-sekarang) sudah sewajarnya

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Indonesia mempersiapkan diri dengan membangun sistem pertahanan yang tangguh dengan memberdayakan TNI sebagai komponen utama di dukung oleh seluruh warga Negara Indonesia sebagai komponen candangan, guna mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama/kemanunggalan seluruh komponen bangsa.

Arah dan sasaran pembangunan kekuatan pertahanan Negara Indonesia bukan untuk memperbesar kekuatan, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan (*filling the gap*) yaitu pembangunan kekuatan pertahanan lebih difokuskan untuk membangun kekuatan TNI minimum yang diperlukan (*Minimum Required Essential Force*). Minimum Required Essential Force dimaksud adalah kekuatan dan kemampuan TNI yang diperlukan untuk mengatasi ancaman yang bersifat mendesak. Sejalan dengan upaya membangun TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara, pembangunan komponen cadangan dan pendukung juga dilakukan secara bertahap.

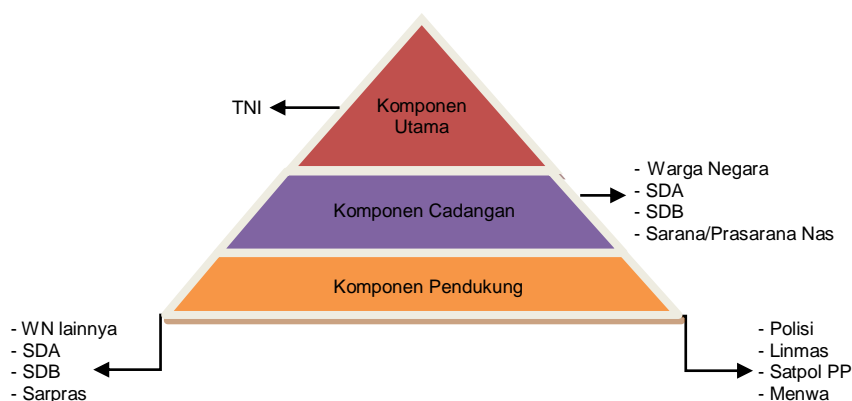
Seiring dengan kebijakan *Minimum Required Essential Force* serta dihadapkan dengan karakteristik perang generasi keempat, TNI AD sebagai bagian dari komponen utama dari pertahanan Negara harus dapat menciptakan kekuatan kewilayahan yang dapat diandalkan, sehingga secara nyata tercipta daya tangkal terhadap pengaruh negatif dan berpotensi sebagai ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, sekaligus secara langsung maupun tidak langsung mendukung program pembangunan kekuatan TNI AD yang siap digunakan bila diperlukan karena itu diperlukan strategi seperti :

- a. Pembangunan kemampuan *surveillance* dan *early warning system* terpadu guna mendeteksi secara dini setiap kegiatan ilegal di wilayah perbatasan.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

- b. Peningkatan kemampuan dukungan logistik/ketahanan pangan untuk kepentingan pelaksanaan pertahanan Negara.
- c. Peningkatan kemampuan Lembaga Pendidikan Teritorial guna membentuk dan mencetak prajurit yang berkualitas.
- d. Peningkatan dukungan kesejahteraan prajurit secara bertahap sesuai dengan kemampuan Negara.
- e. Pembenahan/Revisi piranti lunak guna antisipasi perkembangan situasi yang selalu berubah.

19. Peran satuan teritorial dihadapkan dalam perang generasi keempat. Sesuai dengan UU TNI no 34 tahun 2004 maka TNI memiliki tugas pokok dalam operasi militer selain perang dan sesuai UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 7 ayat 2 tentang Pertahanan Negara maka sistem Pertahanan negara akan melibatkan tiga komponen yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, seperti terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.IV. Komponen Pertahanan Negara

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Dalam mekanismenya Penyelenggaraan pertahanan seperti tertera pada UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 8 menyatakan bahwa Komponen pendukung adalah terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Hal ini berarti bahwa ketika rakyat dicantumkan di dalam UUD 1945 sebagai kekuatan pendukung, maka kekuatan ini harus terkoneksi dengan fungsi komponen pendukung sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Pertahanan mengingat adanya klausul yang menegaskan bahwa sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Maka kekuatan pertahanan nir militer dalam rangka menghadapi ancaman nir militer harus senantiasa dipersiapkan sejak dini, lapis pertahanan nir militer dibangun dan dipersiapkan dalam menangkal dan menghadapi ancaman nir militer mekanisme penyelenggaraan pertahanan nir militer disiapkan secara terus menerus sebagai aspek daya tangkal dan



ketika terjadi ancaman militer maka secara otomatis kekuatan ini sebagai komponen cadangan dapat dimobilisasikan dengan segera. Dari ketentuan tersebut, keterlibatan unsur komando kewilayahan sesuai dengan UU

TNI nomor 34 tahun 2004 harus dapat dioptimalkan yaitu sesuai pasal 7 ayat 2 b dimana TNI memiliki andil dalam tugas pokok OMSP (Operasi Militer Selain Perang) diantaranya yang dapat diserahkan kepada komando kewilayahan adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, yaitu :

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

a. Melakukan pelatihan bela Negara maupun pengerahan wajib militer guna memupuk jiwa kebangsaan dan memfasilitasi terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung bekerjasama dengan Pemda dan Kantor pertahanan diwilayah (kemhan) yang embrionya kini sudah mulai terbentuk.



b. Memberdayakan peran babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam tugas keamanan di wilayah binaannya utamanya terhadap berbagai potensi maupun gejala konflik yang mengganggu ketertiban masyarakat, keseluruhan ini diarahkan untuk menghadapi ancaman nir militer sesuai dengan Perpres 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

c. Melakukan tugas dalam rangka mengatasi bencana sosial yang berawal dari gejala konflik, dengan memberdayakan komunikasi sosial melalui pemberian peran yang lebih luas kepada satuan komando kewilayahan untuk menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan memberikan kewenangan untuk mengatasi gejala konflik pada stadium awal.

Guna mewujudkan harapan tersebut diatas maka organisasi komando kewilayahan sudah selayaknya dilengkapi struktur organisasinya baik personel maupun peralatannya agar selalu siap melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya mekanisme tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan secara politik dari elemen bangsa lainnya.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

20. Gelar Satuan Teritorial dihadapkan dalam perang generasi keempat.

a. Pada saat ini gelar kekuatan kewilayahan TNI AD menggunakan gelar dalam bentuk kompartementasi dimana wilayah Indonesia dibagi menjadi 13 Kodam. Kodam sebagai kompartemen strategis menggunakan wilayah untuk kepentingan militer, bertanggungjawab atas keselamatan



kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, maka gelar kewilayahan saat ini menggunakan strategi pertahanan darat yaitu strategi pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Pembagian wilayah saat ini terdapat 13

Kodam, dengan perbandingan luas wilayah tanggungjawab dan personel yang tersedia maka masih terdapat titik lemah di beberapa Kodam terutama permasalahan dalam rentang kendali dan rantai komando sehingga akan sulit untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh, hal ini berpengaruh langsung terhadap kemampuan serta batas kemampuan Kodam terutama di wilayah Sulawesi dan Papua, karena itu perlu membangun/menambah beberapa Kodam baru terutama di wilayah rawan dan perbatasan darat/laut dengan negara tetangga dengan titik berat perhatian adalah pemenuhan/penyesuaian personel sesuai TOP dan re-materialisasi alutsista yang sudah ada serta pengadaan baru untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

1) Secara umum Kodam I/BB, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya dan Kodam Jaya, sesuai karakteristik dan luas wilayah pertanggung

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

jawabannya gelar satuan yang ada sekarang sudah mencukupi dan mampu menjawab tantangan tugas.

2) Kodam II/Sriwijaya. Ditinjau dari gelar kekuatan minimal sudah cukup memadai. Hanya yang perlu mendapat perhatian adalah Satuan tempur di Bangka Belitung yang saat ini berkekuatan satu Kompi, ditingkatkan menjadi satu Batalyon. Kompi-Kompi tersebut di gelar antara lain di P. Bangka dan P. Belitung. Untuk efektifitas komando dan pengendalian dalam gelar satuan maka diperlukan pembentukan Brigif baru di Lahat.

3) Kodam VI/Mulawarman. Di wilayah ini terdapat \pm 1.038 km garis perbatasan dengan Negara Malaysia sehingga secara tradisional terdapat kerawanan berupa pelanggaran dan penyalahgunaan wilayah perbatasan. Untuk menghadapi ancaman tersebut perlu ditempatkan satuan pengamanan disepanjang perbatasan. Gelar Kekuatan satuan Kodam VI/Mulawarman masih belum memenuhi tuntutan apabila dihadapkan dengan penugasan pengamanan perbatasan. Kedudukan Satuan Banpur cukup jauh dengan perbatasan.



Sedangkan Batalyon yang berada di Malinau sangat terbatas kemampuannya dihadapkan dengan medan yang cukup luas dan ekstrim. Dengan demikian gelar kekuatan yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya Kodam perlu memiliki satu Skuadron Helly serba guna yang dapat memberikan mobilitas khusus untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur. Mengingat kondisi geografi yang

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

sangat terjal dan sebagian masih terisolasi maka perlu dipertimbangkan untuk dislokasi dan penebalan satuan Banpur yang telah ada sehingga lebih dekat dan mudah dikerahkan untuk membantu satuan infanteri di perbatasan.

4) Kodam VII/Wirabuana. Sangat perlu mendapat perhatian adalah pulau terdepan yang belum tergelar Satuan tempur yaitu di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Saat ini baru tergelar satuan Kowil setingkat Koramil, maka kedepan perlu segera direalisasikan pemekaran Koramil menjadi Kodim. Dengan wilayah yang luas serta mempertimbangkan potensi konflik yang ada



maka gelar satuan TNI AD di Sulawesi masih kurang memadai untuk menjawab tantangan tugas. Dengan kondisi ini terdapat rentang kendali yang cukup panjang, beban potensi konflik perbatasan maka perlu

pertimbangan segera untuk merealisasikan reorganisasi Kodam VII/Wirabuana menjadi dua Kodam. Kodam VII/Wirabuana yang ada sekarang membawahi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara serta membentuk Kodam baru sesuai dengan postur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan yang membawahi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian Kodam baru tersebut disiapkan untuk menghadapi ancaman dari utara/barat dan timur.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

5) Kodam IX/Udayana. Garis perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di distrik Maliana, Kovalima dan Oecussi membentang sepanjang kurang lebih 268,8 km sampai ke Kabupaten Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara (TTU) termasuk perbatasan wilayah distrik Oecussi yang merupakan daerah *enclave* (kantong) terjepit antara Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU. Satuan yang tergelar untuk mengamankan perbatasan berasal dari Brigif-21/Komodo di Nyamplong Kupang. Kondisi gelar kekuatan satuan



pengamanan perbatasan yang ada dengan segala keterbatasan sarana akomodasinya dihadapkan dengan permasalahan pelintas batas illegal, penyelundupan, illegal logging dan pergeseran patok perbatasan maka satuan tugas pengamanan perbatasan masih belum optimal dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dengan masih banyaknya permasalahan/konflik yang terjadi antara masyarakat perbatasan yang berada di wilayah RI maupun Timor Leste antara lain sengketa tanah, pencurian, penyelundupan dan pertikaian/konflik yang sering menimbulkan dampak nasional/ internasional dihadapkan dengan keberadaan pos-pos yang cukup jauh dari pemukiman penduduk maka gelar pos pengamanan perbatasan yang ada belum dapat menciptakan stabilitas keamanan secara menyeluruh diperbatasan. Dari tinjauan tersebut diatas maka untuk mendukung pencapaian tugas Satgas pengamanan perbatasan perlu penambahan gelar pos pengamanan baru sehingga seluruh wilayah

perbatasan dapat diamankan dan diawasi oleh satuan tugas pengamanan perbatasan. Selain satuan tersebut diatas juga ada satuan Komando Kewilayahan dari Kodim Belu, Kodim Kefamenanu dan Kodim Soe. Ketertinggalan dalam pembangunan merupakan permasalahan klasik di wilayah ini, kondisi ini diperparah dengan banyaknya pengungsi dari Timor leste yang memilih untuk menjadi warga Negara Indonesia dan ditempatkan secara tersebar di beberapa wilayah penampungan. Dikarenakan adanya perbedaan etnis dan kesenjangan sosial yang rawan menimbulkan gesekan atau konflik komunal maka perlu untuk segera direalisasikan pembangunan Kodim baru di Pulau Rote Ndao sehingga diharapkan untuk dapat mempermudah rentang kendali dan rantai komando serta mempercepat pembangunan wilayah tersebut.

6) Kodam XII/Tanjungpura. Gelar satuan yang ada sekarang ini khususnya di wilayah Kalimantan Tengah masih belum mencukupi untuk menjawab tupok dikarenakan luas wilayah sehingga perlu adanya penambahan 2 (dua) satuan baru setingkat Batalyon. Sementara di wilayah Kalimantan Barat sangat perlu untuk penambahan satuan baru terutama 1 (satu) skadron helikopter serbaguna untuk mendukung mobilitas pasukan dan pendorongan logistik.

7) Kodam XVI/Patimura. Untuk gelar kekuatan di Kodam XVI/ Patimura masih belum dapat menjawab tugas pokok dan menetralkan ancaman. Mengingat potensi konflik yang cukup tinggi maka yang perlu mendapat perhatian di wilayah rawan konflik tersebut adalah peningkatan gelar satuan, hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan satuan baru atau penebalan satuan yang sudah tergelar disesuaikan dengan kebutuhan Komando dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang akan timbul.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

8) Kodam XVII/Cendrawasih. Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memanjang dari Skouw (Jayapura) sampai muara sungai Bensbach, (Merauke) dengan bentangan garis perbatasan sepanjang + 770 km. Adapun gelar satuan organik pengamanan perbatasan dilaksanakan oleh Yonif 751, 752, 753, 754, 755 dan 756 serta diperkuat 4 (empat) Batalyon infanteri penugasan dari luar Kodam XVII/Cendrawasih. Fakta bahwa dalam penugasan di perbatasan belum ada satuan khusus yang bertugas untuk pengamanan perbatasan. Sehingga dengan mengingat sistem gelar dan kekuatan minimal yang harus dipenuhi, sangat perlu adanya prioritas untuk membentuk satuan baru yang bertugas mengamankan wilayah perbatasan dengan kekuatan yang disesuaikan luas wilayah tanggung jawab dan ancaman yang dihadapi. Seiring dengan pemekaran wilayah, potensi konflik komunal serta



kesenjangan sosial yang berujung kepada kerawanan sosial maka di wilayah Papua perlu adanya pembentukan Kodam baru di wilayah Papua Barat sehingga kesulitan dalam rentang kendali serta rantai

komando yang sekarang dihadapi oleh Kodam XVII/Cendrawasih akan bisa dieliminir. Selain itu perlu penambahan Brigade ditempatkan di Papua Barat dengan membawahi Batalyon-batalyon di Sorong, Manokwari. Jika ditinjau dari gelar kekuatan minimal dapat dikategorikan sudah cukup namun perlu percepatan pembentukan 2 (dua) Brigade, 1 Yonif dan 1 Kodim sehingga memudahkan komando dan pengendalian serta mengantisipasi kemungkinan ancaman.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

b. Pemekaran wilayah karena aspirasi Politik Masyarakat secara langsung dan tidak langsung sangat mempengaruhi peran dan tugas pokok TNI AD dalam menyiapkan potensi geografi, demografi dan konsos menjadi RAK Juang yang tangguh dalam rangka kepentingan Hanneg, sehingga tugas satuan kewilayahan akan semakin berat karena pemekaran tersebut akan berimplikasi juga dengan perubahan peta geografi, demografi dan konsos di wilayah tersebut. Penyiapan daerah pangkal perlawanan dalam sistem pertahanan semesta akan semakin sulit dan kompleks, dikarenakan keterbatasan

gelar satuan kewilayahan terkecil (Koramil yang ada 3.954 dan membina Kecamatan sebanyak 6.994) tidak sebanding dengan pertumbuhan kecamatan. Terlebih lagi Babinsa sebagai ujung



tombak pembinaan teritorial terdepan sangat kurang (dari jumlah 81.254 Desa/Kelurahan, Babinsa yang ada hanya 46.927). Perlu adanya penambahan satuan setingkat Kodim maupun Koramil dalam rangka mengimbangi pemekaran daerah dan perlu penambahan personil Babinsa disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan luas wilayah dari jumlah desa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembina desa sehingga diharapkan perbandingan jumlah Babinsa dan jumlah desa seimbang dengan beban tugas. Khususnya Kodim dan Koramil diharapkan mampu digelar secara proporsional, yakni untuk Kodim maksimal bertanggungjawab terhadap 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Koramil maksimal bertanggungjawab terhadap 2 (dua) wilayah Kecamatan.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

c. Di beberapa kompartemen strategis (Kodam) dalam melaksanakan tugas pokoknya, saat ini masih menghadapi kekuatan bersenjata, gerakan separatis dan konflik sosial yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga diperlukan pengerahan kekuatan satuan terpusat. Hal ini menunjukkan bahwa gelar satuan di wilayah kompartemen strategis belum mampu mengatasi permasalahan yang timbul. Penyelesaian masalah konflik komunal yang bersifat residual di suatu wilayah apabila tidak teratasi akan memicu konflik komunal di wilayah lain. Dengan terbatasnya infrastruktur yang ada untuk pengerahan satuan yang dislokasinya tersebar, akan



menghambat pengerahan struktur yang ada akan menghambat pengerahan satuan dalam mengatasi secara cepat terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam disuatu *trouble spot*.

d. Rongrongan kerusuhan komunal dan permasalahan perbatasan darat, serta potensi konflik dengan negara lain merupakan permasalahan yang harus dicegah setiap saat, oleh karenanya pembentukan satuan kewilayahan di daerah perbatasan untuk mengantisipasi hakikat ancaman di wilayah tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak.

e. Satuan Bantuan Tempur ditiap-tiap Kodam perlu digelar minimal 1 (satu) Batalyon Kavaleri, 1 (satu) Batalyon Armed, 1 (satu) Batalyon Arhanud/Baterai Arhanud, 1 (satu) Batalyon Zeni Tempur/dengan demikian Kodam sebagai Kompartemen Strategis mampu bertempur secara mandiri dan berlarut.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

f. Gelar satuan kewilayahan dengan strategi pertahanan negara dihadapkan kemungkinan ancaman yang terjadi belum sinkron secara keseluruhan sehingga perlu adanya pembenahan dan penataan gelar satuan kewilayahan.

21. Ancaman yang dihadapi dalam perang generasi keempat. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Berbagai bentuk ancaman saat ini ada dihadapan kita, ancaman tersebut banyak menjadikan masyarakat sebagai sasaran seiring rendahnya pendidikan karakter kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air dan arus globalisasi yang begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda. Adapun ancaman pada perang generasi keempat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, mengingat pada perang ini tidak melibatkan perang secara konvensional atau tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi separatis, terorisme, perbatasan, obyek vital, VVIP, konflik SARA, bencana alam, kejahatan lintas negara, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi dan keselamatan umum antara lain sebagai berikut :



a. Ancaman Agresi Militer. Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Posisi seperti ini, berimplikasi pada terjalinnya kepentingan negara-negara lain

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

dengan kepentingan nasional Indonesia. Mencermati dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan tradisional berupa invansi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain. Ancaman Non Tradisional Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

negara kedepan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.

Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidaknya ancaman.

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Isu keamanan aktual seperti diuraikan sebelumnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti terutama pada dekade terakhir. Oleh karena itu, maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demikian maka prioritas penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan dunia luar. Oleh karena itu kebijakan pertahanan ke depan, juga diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun lingkup yang lebih luas.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia serta untuk mengatisipasi masuknya kultur atau faham/ajaran dari luar yang berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa-Negara.

b. Ancaman Separatis. Ancaman separatisme (pemisahan diri) terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan persoalan pelik yang hingga kini belum terselesaikan dengan tuntas. Situasi ini tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia yang sangat majemuk, terdiri atas beragam suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan. Belum lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas beribu pulau dan terletak di persilangan dua budaya besar dunia. Hal ini pula yang menjadikan masalah separatisme sebagai masalah yang teramat sensitif karena dapat terjadi di mana saja di wilayah Indonesia serta dapat dilatarbelakangi oleh berbagai perbedaan yang telah ada.



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang berbagai ancaman separatisme muncul di berbagai tempat, mulai dari sekadar wacana maupun yang telah menjelma menjadi kelompok terorganisir. Hanya ancaman separatis di Aceh, Maluku, dan Papua yang benar-benar merupakan ancaman yang lebih serius. Jika kembali pada konsepsi dasar pembentukan wilayah Indonesia dimana wilayah Indonesia dapat didefinisikan sebagai wilayah nusantara bekas jajahan Belanda adalah wilayah Indonesia. Dengan demikian masalah legalitas wilayah terpecahkan secara lebih mudah dan diterima oleh rakyatnya maupun komunitas internasional. Lewat landasan yang sama, maka rasional untuk memisahkan diri bagi bagian-bagian wilayah yang termasuk bekas jajahan Belanda itu tidak kuat. Artinya, aspirasi separatisme, secara hukum internasional maupun nasional, dapat dengan absah diatasi lewat kekuatan militer.

Apapun masalah yang mendasari berkembangnya ancaman separatisme dalam NKRI, gerakan separatis yang ada sekarang telah melakukan berbagai perubahan strategi dalam meloloskan agenda mereka. Adanya perubahan dunia ke arah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, cukup memberi ruang baru bagi gerakan separatisme di Indonesia. Di samping itu, pergolakan politik Indonesia di akhir 1990-an secara tidak langsung telah memberikan peluang bagi mereka untuk kembali memperkuat eksistensi dan misi mereka. Perubahan-perubahan ini mau tidak mau harus disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah RI dalam menghadapi polah tingkah gerakan separatis di Indonesia. Di satu sisi, Pemerintah RI tidak lagi dapat menerapkan paradigma lama dimana separatisme merupakan problem domestik dalam negeri yang dapat begitu saja mengabaikan suara-suara dari dunia internasional. Sedangkan di sisi lain, Pemerintah RI adalah pemerintahan yang berdaulat yang tidak boleh begitu saja

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

tunduk kepada kepentingan internasional (asing) yang ada di balik gerakan separatis. Oleh karena itu, sikap hati-hati dan waspada Pemerintah RI harus didukung dengan pendekatan-pendekatan baru dalam menghadapi ancaman separatisme.

Gerakan separatis bersenjata dan politik yang dilakukan beberapa bulan terakhir adalah bagian dari rangkaian perang generasi keempat yang diduga melibatkan *non state actors*. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai perang opini di media massa baik cetak maupun elektronik. Adapun pendukung gerakan tersebut berasal dari berbagai negara dimana negara yang ditempati oleh *non state actor* tersebut, memanfaatkan celah-celah hukum dan undang-undang yang dapat mendirikan suatu organisasi secara bebas tanpa dikenai sanksi hukum. Sehingga keleluasaan tersebut menyebabkan kekuatan separatis semakin bertambah kuat.

c. Ancaman terorisme. Terorisme adalah permasalahan yang kompleks. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari upaya para ahli untuk menguraikan terorisme melalui berbagai macam definisi untuk mengidentifikasi tindakan, karakteristik maupun akar permasalahannya dan dari beragam definisi tersebut, tidak ada satu definisi tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme diseluruh dunia. Kompleksitas juga muncul karena faktanya, label 'terorisme' digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena dengan lingkup yang luas.



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Munculnya kelompok seperti Al Qaeda, berbasis religius juga menjadi bagian dari variasi identifikasi mengenai kelompok teroris, khususnya yang terjadi dalam dasawarsa terakhir. Sebagai salah satu kelompok teroris, Al Qaeda juga menjadi semakin signifikan ketika dengan basis religiusnya, kelompok ini diduga memiliki jaringan global yang luas dan menjadi ancaman internasional. Keberadaan Al Qaeda juga menjadi pemicu munculnya klaim bahwa fenomena terorisme adalah fenomena global yang muncul akibat jaringan Al Qaeda di berbagai negara. Al Qaeda yang sejak peristiwa 9/11 menjadi kelompok teroris yang diduga terkait dengan berbagai kelompok terorisme di seluruh dunia serta menyebabkan aksi-aksi terorisme dalam lingkup internasional.

Di Indonesia sendiri, terorisme dikaitkan dengan keberadaan kelompok Jemaah Islamiyah (JI), kelompok radikal Islam yang dianggap menjadi ancaman serius bagi keamanan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia terkait dengan identifikasi pada anggota JI sebagai otak dan pelaku aksi-aksi terorisme di Indonesia oleh pihak kepolisian. Beberapa pihak mengklaim bahwa JI juga merupakan kelompok yang berafiliasi dengan Al Qaeda dengan menggunakan style ala Al Qaeda dalam melaksanakan aksinya. Namun dalam memahami akar permasalahan terorisme, kemunculan dari kelompok-kelompok teroris tidak hanya disebabkan oleh satu faktor akan tetapi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Baik melalui pendekatan struktural maupun individu, faktor-faktor muncul beragam, dan kemunculan kelompok teroris ataupun aksi terorisme berasal dari interaksi antara faktor-faktor tersebut. Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok JI dalam kasus



Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor afiliasi dengan Al Qaeda semata. Bukan hanya faktor internasional, tetapi faktor-faktor lain seperti kondisi domestik juga berpengaruh dalam munculnya terorisme di Indonesia.

d. Ancaman perbatasan. Pada perang generasi ke empat ini, ancaman nir militer cenderung lebih menonjol dibandingkan ancaman militer dimana ancaman militer terhadap pertahanan negara bakal mengecil di masa depan, namun ancaman nir militer akan mendominasi. Ancaman yang paling membahayakan pertahanan nasional dan kedaulatan NKRI di daerah perbatasan bukan ancaman militer dari kekuatan militer asing, melainkan ancaman nir militer. Bila kekuatan militer bisa dideteksi dan dihadapi dengan kekuatan militer, yakni TNI yang ditempatkan di perbatasan, tetapi ancaman nir militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum akan sulit dideteksi dan dihadapi secara militer. Salah satu bentuk ancaman



nir militer adalah informasi dan teknologi dari negara tetangga yang sulit dibendung dan kemudian diterima masyarakat perbatasan. Bila hal ini dibiarkan, tanpa upaya menanganinya maka pengaruh informasi tersebut dikhawatirkan dapat mengikis rasa nasionalisme masyarakat perbatasan. Hal ini sudah terbukti dimana masyarakat perbatasan direkrut menjadi prajurit wantaniah oleh negara tetangga kita. Mengingat, masyarakat di daerah perbatasan umumnya masih terisolasi dan tidak banyak menerima siaran nasional, sebaliknya lebih banyak menerima informasi dari negara-negara tetangga. Oleh karena itu, diperlukan pemberian informasi yang mendidik, positif dan nasionalis

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

secara terus menerus dari pemerintah. Terkait hal ini, maka Negara berkewajiban untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat perbatasan. Banyak orang berpendapat bahwa masalah di perbatasan adalah penting. Sayangnya, masalah akses informasi di perbatasan dianggap kurang urgen (penting) dan mendesak. Padahal, informasi memiliki nilai sangat strategis dalam pertahanan dan keamanan sebuah Negara, karena menyangkut kedaulatan NKRI. Sehingga pembangunan infrastruktur komunikasi dan penyediaan informasi nasional bagi masyarakat di perbatasan sangat penting. Persoalan kebutuhan informasi bagi masyarakat di perbatasan harus segera diwujudkan, karena merupakan salah bentuk pertahanan nir militer yang akan menetralsir ancaman nir militer negara lain. Kita harus membangun kekuatan nir militer untuk mencegah ancaman-ancaman yang masuk dalam bentuk lain, melalui siaran-siaran informasi nasional dalam berbagai bentuk media, baik elektronik maupun cetak.

Oleh karenanya kita berharap agar tindakan yang perlu mendapatkan prioritas adalah menetapkan regulasi terkait akses informasi di perbatasan. Hal ini tentunya memerlukan keterlibatan berbagai instansi terkait seperti Kemenhan, Kemkominfo, KPI dan tak kalah penting keterlibatan aparat teritorial dalam satu kesatuan kerjasama untuk menetapkan keputusan dalam rangka menjaga setiap jengkal tanah dan wilayah NKRI tercinta.



e. Ancaman Obyek vital dan VVIP. Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap obyek vital nasional termasuk aksi terorisme, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Keppres 63 Tahun 2004 Mendefinisikan Obyek Vital Nasional sebagai kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri seperti: menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan; ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penanganan ancaman objek vital dan VVIP merupakan gambaran barometer nasional dan tentunya akan juga berkaitan dengan citra bangsa di mata internasional. Kegagalan penanganannya akan berdampak luas dan dapat menimbulkan keresahan serta ketakutan bagi masyarakat, terutama masyarakat internasional. Selain menyebabkan kerusakan sosial juga akan mengganggu citra diplomasi Indonesia di mata komunikasi asing. Sehingga pengendaliannya memerlukan penanganan secara khusus dan segera. Pola-pola pengamanan objek vital, fasilitas diplomatik, dan VVIP merupakan salah satu bagian manajemen keamanan (*security*

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

management). Pengamanannya dilakukan dengan tindakan-tindakan dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dan dirasakan mengganggu, menghambat atau mengancam kehidupan sosial masyarakat yang berada di kawasan objek vital maupun fasilitas VVIP, masalah atau ancaman di kawasan objek vital atau fasilitas VVIP tentu sangat berbeda dengan masalah di wilayah lain.

Dikaitkan dengan perang generasi ke empat bahwa ancaman obyek vital dan VVIP sangatlah rentan dimana target dari *non state actor* akan berupaya mencari celah untuk mengambil alih obyek vital dengan cara-caranya tersendiri dan berbagai macam cara, apakah melalui cara legal dalam hal ini privatisasi atau secara ekstra legal sehingga kegiatan non state actor tersebut perlu diwaspadai. Demikian juga ancaman terhadap VVIP dalam hal ini Presiden RI, dimana Presiden RI beberapa tahun lalu telah mendapatkan ancaman serius dari kelompok teroris yang menginginkan kepala Negara RI tersebut dapat dibunuh tentunya ada maksud dan kepentingan tertentu yang dilakukan oleh *non state actor* dalam mencapai tujuannya. Untuk itu ancaman terhadap obyek vital dan VVIP sangat perlu diwaspadai mengingat obyek vital yang merupakan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis dan VVIP adalah pimpinan nasional yang perlu dilindungi guna menjaga kestabilan jalannya pemerintahan.

f. Ancaman Konflik SARA. Negara kita yang dikenal terdiri dari ribuan suku, dan terkelompok menjadi 5 agama serta aliran kepercayaan, mempunyai potensi besar terjadinya konflik komunal yang mudah tersulut apabila tidak diantisipasi dengan baik. Konflik Ambon, Poso, Dayak dan Madura serta maraknya terorisme yang berkedok agama

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

merupakan bukti nyata ancaman perang generasi keempat yang menghantui bangsa ini, selain ancaman asimetrik lain dalam aspek kehidupan; Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Akhir-akhir ini nampaknya sejarah bangsa terulang saat kita dijajah selama 3,5 abad dengan politik *divide et impera*. Politik pecah belah tersebut sesungguhnya adalah taktik yang paling gampang dan murah dalam konsep perang generasi ke empat. Rakyat dipecah belah dengan menunggangi suku dan agama. Karena agama begitu kuat mendorong manusia untuk berjuang sampai dengan titik darah penghabisan dalam mempertahankan kepercayaan.



Menjawab semua kondisi tersebut perlu kiranya kita kembali memahami dan memupuk rasa Nasionalisme sebagai sebuah nilai *identitas* bangsa. Kecintaan terhadap bangsa dapat diwujudkan jika rakyat nyaman, bangga dan bersyukur terhadap bumi Indonesia yang gemah ripah loh jinawi (subur dan makmur) ini. Hanya dengan Gerakan Nasional yang dimotori oleh kekuatan besar lah yang mampu kembali membangkitkan semangat kebangkitan Nasional Budi Utomo. Tentunya untuk sebuah muara kebersamaan dalam mengantisipasi potensi asimetrik yang mungkin akan masuk di *era free trade* yang akan kita hadapi di tahun 2015.

Lebih jauh, negara kita sebenarnya telah memiliki sebuah konsep pemersatu bangsa yang ampuh yakni Bhineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hidup berdampingan dengan berbeda-beda suku, agama maupun kepercayaan harus dipupuk. Ibarat tanaman, semangat Bhinneka Tunggal

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Ika ini sudah mulai layu karena tidak pernah disiram dan dipupuk oleh pemiliknya. Minimnya kegiatan yang bersifat nasional dengan mengusung keberagaman telah membuat kita larut dalam hiruk pikuk otonomi daerah. Semua sibuk memikirkan perebutan kekuasaan dan eksploitasi kedaerahan sedangkan pertahanan terhadap potensi disintegrasi masih belum matang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka peran aparat teritorial dan aparat intelijen harus diperkuat sebagai deteksi dini adanya potensi perpecahan.

g. Ancaman lainnya:

1) Di bidang ideologi (ancaman terhadap Pancasila).

a) Neokomunis dan Neoliberalisme. Pada masa perang dingin, dunia barat dan asia termasuk Indonesia takut akan adanya ancaman komunis sehingga ideologi ini berupaya dihancurkan. Dengan runtuhnya Uni Soviet maka pengaruh komunis semakin meredup kemudian muncul ideologi baru yang berasal dari barat yaitu Neoliberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. Seiring dengan keterpurukan yang terjadi saat ini di Eropa. Diyakini bahwa Ideologi Neoliberal merupakan ancaman baru bagi dunia juga bagi Indonesia. Keruntuhan perekonomian di Yunani, Italia, Portugal, Spanyol diyakini tidak terlepas dari ideologi Neoliberalisme. Adapun konsep dasar dari Neoliberalisme berupa deregulasi, privatisasi dan pembatasan subsidi sosial pemerintah. Dasar dari politik neoliberalisme pada sektor ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dioptimalkan dengan cara memberikan kebebasan pada sektor bisnis. Dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi dengan meniadakan peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan perekonomian sehingga tidak diperlukan

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

kontrol pemerintah yang ketat, dengan maksud terciptanya pasar bebas dan terbuka, agar para investor akan berdatangan sehingga tercipta pasar kompetitif yang mendorong pertumbuhan perekonomian. Sedangkan privatisasi adalah salah satu kebijakan khas neoliberal seperti; dana pensiun, kesehatan, pendidikan, tambang, gas, air dan lain-lain dikuasai swasta dan asing tentunya sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33. Kebijakan privatisasi hanya menguntungkan beberapa kelompok saja dan tentunya tidak pro rakyat, hal ini sudah terjadi di Eropa.

Pada saat ini praktek yang terjadi Indonesia sudah mencerminkan Neoliberal; perbankan, sembako, SDA dialihkan investornya ke swasta atau asing. Krisis pangan akibat kebijakan impor tentunya merugikan petani, gas minyak, batubara juga sudah dikuasai asing. Perekonomian adalah sumber penghasilan negara, apabila diserahkan ke sektor swasta maka kedaulatan rakyat/negara sudah tidak ada. Akibatnya negara seperti krisis 1998 akan membuat ketergantungan kita pada satu kekuatan yaitu pada pemilik modal. Apalagi saat ini kelompok Neokomunis dan Neoliberalisme menjadi satu dibawah payung LSM dengan memunculkan isu-isu HAM, Lingkungan Hidup, demokratisasi dan terorisme dalam upaya menghancurkan demokrasi Pancasila yang merupakan sendi kehidupan berbangsa dan negara yang paling tepat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Masuknya ideologi tersebut ke Indonesia, melalui perpanjangan tangan perusahaan asing seperti: Free Port, perusahaan gas di Aceh, Celah Timor dan lain-lain. Daerah-daerah rawan konflik maupun yang pernah mengalami kerusakan sosial, merupakan campur tangan asing untuk

mengeruk keuntungan dengan melakukan aksi adu domba antar masyarakat setempat secara horizontal sebagai hasil dari bentuk insurjensi dalam rangka menguasai Sumber Daya alam kita.

Disamping itu, hembusan isu globalisasi melalui taktik insurjensi mampu meyakinkan generasi muda Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan, kemakmuran dan kemudahan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan arah ideologi generasi muda Indonesia dari Pancasila ke ideologi Neoliberalisme. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat Pancasila merupakan dasar Negara dan sumber dari aturan yang berlaku di Indonesia. Saat ini, kita melihat seberapa banyak generasi muda kita yang tidak hafal akan sila yang terdapat dalam Pancasila, sebuah realitas yang sangat memprihatinkan sebab bagaimana generasi muda akan mengamalkan Pancasila jika sila yang terdapat didalamnya saja tidak hafal dan generasi muda adalah sosok manusia Indonesia yang ke depan akan menjadi pembela dan pelestari Pancasila sebagai dasar, identitas nasional dan falsafah Bangsa Indonesia. Selain itu, pengaruh globalisasi tersebut telah membuat masyarakat khususnya generasi muda Indonesia sekarang kehilangan kepribadian dan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dari cara berpakaian, berbahasa, etika dan sopan santun, munculnya sikap individualisme dan minimnya tanggung rasa dan semangat gotong-royong yang selama ini menjadi modal perekat dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

b) Neokolonialisme dan Neokapitalisme. Merupakan salah satu perang generasi ke empat dimana Neokolonialisme dan Neokapitalisme sebagai alat perang baru negara maju, yang tampil sebagai dewa penolong dalam masa krisis akan tetapi tidak ada makan siang yang gratis, artinya tentunya mementingkan imbalan. Hal seperti ini perlu diwaspadai mengingat perusahaan multi nasional yang ada di Indonesia memiliki otoritas lebih besar dari pemerintah setempat karena kemungkinan memiliki modal tunai yang lebih besar dari APBN seperti contoh Free Port. Dalam konteks Neokolonialisme dan neo kapitalisme, negara-negara maju yang masuk kelompok negara-negara kuat akan memakan negara-negara berkembang. Globalisasi telah membelah dunia atas dua bagian yaitu pemenang dan kalah. Tentunya yang kalah bersaing akan selalu berada pada posisi tawar yang lemah karena kelemahan sumber daya manusia, modal, teknologi dan kurang percaya diri sehingga akan terus menjadi pasar dan konsumen bagi produk-produk bagi pemenang. Sangat disayangkan, Indonesia negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan aset sosial budaya tetapi masih banyak rakyatnya yang makan saja masih sulit. Untuk itu, seluruh komponen bangsa harus mau berubah tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Kemauan untuk berubah akan mendorong kemandirian bangsa yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan global.

c) Radikalisme. Radikalisme juga sangat erat dengan perang generasi ke empat. Radikal sebagai kata benda didefinisikan oleh Cambridge Advanced Learners' Dictionary sebagai *a person who supports great social and political change*, "seseorang yang mendukung

perubahan sosial dan politik yang besar". Pengertian ini erat terkait dengan isme yang melekat pada kosa kata tersebut yang kemudian diartikan oleh kebanyakan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai keakarnya dengan berbagai cara, dan apabila perlu menggunakan cara-cara kekerasan.

Sebagai sebuah gerakan, radikalisme memiliki berbagai bentuk, dari yang paling abstrak sampai dengan yang kongkrit. Yang paling abstrak adalah pemikiran yang intoleran terhadap yang lain. Pemikiran yang intoleran ini menjadi musabab awal munculnya sikap dan tindakan tidak toleran yang sering dibarengi dengan pemaksaan dan kekerasan. Menguatnya fanatisme dan radikalisme keagamaan maupun kesukuan merupakan ancaman baru bagi demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. Fanatisme yang berlebihan bisa memunculkan intoleransi dan pengkotak-kotakan masyarakat yang jika dibiarkan bisa berkembang menjadi konflik horizontal. Dalam konteks pembicaraan Indonesia yang dimaklumi sebagai negara yang amat plural penduduknya, persatuan dan kesatuan menjadi keniscayaan. Segala bentuk ikhtiar untuk mempersatukan semua elemen bangsa di tengah segala bentuk keragamaman mestinya diapresiasi. Pada saat yang bersamaan, pemikiran, sikap dan tindakan kelompok yang radikal, tentu memiliki andil dalam ancaman integrasi bangsa, apabila tidak ditemukan cara-cara persuasif, sekaligus perbaikan berbagai sisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Radikalisme sekelompok dalam masyarakat akan menjadi pemantik yang efektif bagi munculnya radikalisme serupa dari kelompok yang lain. Kontastasi radikalisme akan memunculkan situasi chaos, yang apabila negara tidak mampu mengambil peran secara proporsional tentunya menjadi ancaman bagi kebersamaan di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Indonesia sebagai negara yang sudah berpengalaman mengelola keragaman semenjak merdeka tahun 1945 perlu pula belajar dari negara lain yang "gagal". Meski harus pula diakui, bahwa Indonesia cukup berhasil dalam mempertahankan keragaman tersebut di tengah tengah riak dan kegaduhan kekerasan yang mengatasnamakan SARA.

Untuk mengatasi hal tersebut, satu-satunya yang masih kuat memegang teguh nilai luhur bangsa tersebut adalah TNI. Dengan peran binter yang dimiliki diharapkan aparat teritorial tidak bosan-bosannya untuk berupaya memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjadi disintegrasi bangsa maka Pancasila adalah perekat bangsa yang efektif. Namun, semasa Orde Baru, Pancasila diterjemahkan secara salah bahkan disosialisasikan secara represif sehingga mengundang sinisme masyarakat. Kini Pancasila perlu disosialisasikan dengan cara baru sehingga efektif sebagai perekat bangsa. Peran aparat teritorial masih sangat dibutuhkan dimasyarakat meskipun ada beberapa pihak yang berbeda pendapat tentunya wajar mengingat adanya *non state actor* yang bermain didalamnya guna membuat disintegrasi bangsa sesuai tujuannya.

2) Ancaman Politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat Internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di saat negara membutuhkan soliditas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompok, golongan (partai) bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya. Untuk itu sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk dikemudian bersatu bahu membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi.

Kehadiran globalisasi dalam perang generasi keempat tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Adapun pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme yaitu dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa Nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa Nasionalisme bangsa akan hilang. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap Nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa Nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

3) Ancaman Ekonomi. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan daerah yang sangat subur sehingga banyak bangsa lain yang tertarik dengan keindahan alam dan sumber daya alamnya. Kesuburan dan keindahan alam ini membawa malapetaka, dimana bangsa Belanda tidak hanya mengurus kekayaan alam akan tetapi menjadikan bangsa Indonesia sebagai budak pekerja sosial oleh

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Belanda selama 3,5 abad lamanya. Setelah perang dingin antara Amerika dan Unisoviet selesai yang dimenangkan Amerika maka Amerika berupaya mengontrol dunia dengan memfitnah negara yang dijadikan target dengan isu globalisasi seperti Demokratisasi, HAM, Lingkungan Hidup, terorisme dan memiliki senjata nuklir ilegal namun kita ketahui bersama sasaran utamanya adalah menguasai bahan dasar alamnya salah satu minyak dikawasan teluk. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa di timur tengah seperti, Afganistan, Iran, Irak dan lain-lain memiliki rasa dendam kepada Amerika.

Saat ini perkembangan situasi global sedang dilanda perebutan *material dasar* oleh Amerika Serikat dan China. Material dasar tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan bahan dasar membuat peralatan perangnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, saat ini memiliki kekayaan alam "*raw material*" yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan kondisi seperti ini, Indonesia pasti menjadi pusat perebutan pengaruh antara negara-negara yang berkepentingan. Adapun Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai Nasionalisme adalah dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Sedangkan Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai Nasionalisme adalah dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut, dll) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

menunjukkan gejala berkurangnya rasa Nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan Internasional. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sedangkan, ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa kemajuan ekonomi dan peradaban bangsa. Misalnya, dengan adanya pasar bebas, akan membuat barang-barang dari luar negeri bebas dipasarkan di dalam negeri kita juga mudah dapat menikmati produk-produk tersebut, tetapi di sisi lain bila kita kalah bersaing maka ekonomi kita akan dikuasai oleh pihak asing.

4) Ancaman Sosial Budaya. Kemajuan teknologi dan informasi membuat budaya asing masuk ke Indonesia dengan mudah. Masuknya budaya asing ke Indonesia berdampak kepada pengaruh negatif dan positif. Adapun pengaruh positif atas masuknya budaya asing berdampak kepada cara kita meniru pola berpikir yang baik, seperti etos kerja yang baik, disiplin yang tinggi dan Iptek yang canggih, yang dapat meningkatkan kemampuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa Nasionalisme kita terhadap bangsa. Sedangkan pengaruh negatif, meniru norma budaya yang negatif seperti: ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ada beberapa ancaman sosial budaya yang telah merusak moral bangsa Indonesia diantaranya :

a) Ancaman Budaya. Seiring dengan masuknya era globalisasi, turut masuk juga budaya-budaya asing yang masuk secara bebas tanpa ada filterisasi. Bahkan, cenderung mengganti budaya asli Indonesia dengan budaya luar tersebut dan menjadikan budaya asli Indonesia hanya sebatas untuk seremonial belaka, sebagai contoh: lunturnya musik-musik tradisional, lunturnya budaya Indonesia dalam film-film lokal dan minimnya pentas seni lokal jika dibandingkan dengan pentas seni kontemporer modern. Hal tersebut mencerminkan bahwa, globalisasi dapat dengan mudah mengubah nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat Sebuah bangsa akan abadi dan bermartabat jika generasi mudanya peduli terhadap budaya-budaya serta pedoman hidup yang telah mengakar abadi sebelumnya di tengah masyarakat. Serta dapat dengan baik membagi-bagi efek globalisasi sesuai norma yang ada, bermanfaat atau tidak bagi kelestarian suatu identitas bangsa Indonesia.

b) Ancaman Sosial.

(1) Korupsi. Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Sebuah ironi jika kita disuguhi sebuah kenyataan bahwa para koruptor yang saat ini sedang berperkara dan menjadi topik pembicaraan nasional beberapa diantaranya pejabat negara. Mereka ini seharusnya sebagai *agent of change* tampil dimuka menjadi pelopor pemberantasan korupsi malah menjadi tertuduh koruptor. Padahal, korupsi merupakan salah satu faktor yang menjadikan Bangsa ini jalan ditempat yang apabila tidak diberantas bukan tidak mungkin dapat melumpuhkan dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penggunaan Narkotika dan Obat Terlarang. Menurut survei nasional terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2011 diperoleh angka sebesar 2,2% dari penduduk Indonesia atau sekitar 4 juta penduduk Indonesia berusia 10-59 tahun sebagai penyalahguna Narkoba dan \pm 800.000 ribu dan penyalahguna tersebut adalah mahasiswa dan pelajar. Suatu hal yang cukup mengkhawatirkan mengingat data tersebut merupakan cerminan dari sebagian generasi muda Indonesia. Sebuah bangsa tidak akan mampu dipertahankan oleh generasi muda yang pecandu, sehingga sudah semestinya penyalahgunaan Narkoba menjadi ancaman peperangan asimetris yang nyata dan sudah ada dilingkungan kita.

5) Ancaman Informasi dan Komunikasi. Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, kita akan

mendapat kerugian. Dan sekarang ini, banyak masyarakat yang menggunakan tidak semestinya, misal untuk membuka situs-situs porno seperti yang dilakukan oleh salah satu dewan perwakilan rakyat. Bukan hanya internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka yaitu handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphone.

Jika ditinjau dari segi positifnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat tapi kejahatan mengikuti perkembangan tersebut seperti kejahatan *cyber* dan kejahatan perbankan. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat fenomenal. Perannya dalam memajukan peradaban manusia sangat besar dan sangat nyata, terutama bagi masyarakat sederhana di perkotaan apalagi di perdesaan. Namun, konsumerisme yang dapat diasosiasikan dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang begitu pesat misalnya adalah salahsatu contoh kemajuan di bidang TIK. Internet, memiliki banyak nilai positifnya terutama sebagai perpustakaan online, internet juga menyembunyikan kekuatan destruktif yang luar biasa besarnya. Dengan aksesibilitas dan keterbukaannya yang semakin luas, internet dapat menjadi media yang sangat ideal untuk propaganda dan perang psikologis, subversi budaya dan politik, agitasi dan misinformasi. Internet juga dapat menjadi berkembang biaknya kejahatan seperti untuk penjualan bahan-bahan kimia dan obat-obatan terlarang, narkoba, senjata, perempuan dan anak-anak, transfer *money laundering* dan sarana peluncuran kejahatan dunia maya (*cyber crimes*) lainnya yang lebih menakutkan dan mengancam eksistensi manusia. Binter wilayah pertahanan adalah salah satu solusinya tetapi TNI

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

juga harus menguasai TIK melalui pengembangan SDM yang handal dan memiliki sarana dan peralatan pendukung yang canggih untuk dapat meminimalkan perkembangan biakan kejahatan yang mengancam NKRI.

Ke depan, jika perang fisik memang diperlukan, mungkin terjadi hanya antara negara-negara berkembang yang merasa kuat untuk bangkit melawan sesama negara berkembang, otot dan kekuatan alat dan sarana penunjang perang konvensional masih tetap diandalkannya. Sebaliknya negara-negara maju, jika ingin berperang, cukup mengandalkan teknologi maju yang relatif jauh lebih efektif, ekonomis dengan korban jiwa paling minim. *War of the brains atau silent war* mungkin akan mendominasi dan bentuknya jauh lebih maju, misalnya mengirimkan *virus secara remote* untuk merusak sistem pengendali senjata yang berbasis elektronik. Perang mungkin tidak lagi harus berupa *physical contact*, mungkin cukup *eye contact* saja. Dengan demikian biayanya memang akan jauh lebih murah, logistik yang perlu dimobilisasi juga lebih sedikit (hemat). Pasukannya pun tidak perlu banyak bahkan tidak memerlukan seragam khusus karena dianggap kurang penting. Yang banyak justru *plain-clothed army personnel* yang kehadirannya justru lebih sadis dan menakutkan, tidak menumpahkan darah tetapi menguras sumber daya alam, memeras dan menekan melalui keunggulan teknologi dan sering berusaha menggurui bahkan mendikte kebijakan nasional sehingga lebih merupakan *silent and cold-blooded killers*. Pada akhirnya memang, perang fisik tidak akan diperlukan lagi, hanya saja negara yang paling kuat dan maju teknologinya akan menekan negara-negara yang teknologinya berkelas lebih rendah atau teknologi yang dibeli, bukan yang diadaptasi atau diperbaiki. Karena

itulah, mari kita berdayakan semua potensi yang kita miliki secara optimal untuk mengejar ketertinggalan kita.

6) Ancaman keselamatan umum. Ancaman di bidang keselamatan umum diantaranya lingkungan, salah satu fenomena ancaman global di bidang lingkungan hidup adalah pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (*green house effect*) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Pemanasan global menimbulkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dan sebagainya).

Dari uraian di atas, TNI berupaya meningkatkan kemampuan personel maupun satuan untuk seoptimal mungkin dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi teritorial TNI dalam bhakti TNI untuk menghijaukan seluruh muka bumi Indonesia guna mencegah isu bahwa Indonesia sebagai salah satu perusak sistem lingkungan hidup atas penggundulan hutan di Indonesia. Penghijauan salah satu implementasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena hijaunya hutan maka bencana alam banjir dan tanah longsor dapat dieliminir sehingga tuduhan Indonesia salah satu penyumbang pemanasan global tidak terbukti.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

Disamping itu ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, kecelakaan transportasi. Ancaman yang terjadi di Indonesia hampir semua menyangkut masalah keselamatan baik yang berasal dari alam maupun dari manusia itu sendiri mengingat manusia Indonesia yang sudah terkontaminasi liberalisme dan Neokolonisme hanya dapat menuntut kepada pemerintah dan sedikit menyumbang kewajiban sebagai warga negara, sehingga peran TNI dalam hal ini teritorial yang sangat dibutuhkan untuk membantu menyadarkan masyarakat keluar dari permasalahan lingkungan dan dari dirinya sendiri.

h. Antisipasi ancaman. Berdasarkan uraian analisa tersebut diatas, aparat teritorial hendaknya mewaspadaai ancaman perang generasi keempat, mengingat Perang generasi keempat ini lebih kompleks dan rumit karena aktornya tidak hanya pemerintah dari Negara tertentu, tapi bisa lembaga maupun perorangan dari masyarakat global. Perang tersebut melibatkan masyarakat global yang saling terhubungkan satu sama lain serta bergerak secara independen dan bersama-sama dengan tujuan tertentu untuk melemahkan negara yang dianggap mengancam atau mempertahankan status quo dalam hubungan global.

Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam globalisme di dunia harus mewaspadaai ancaman perang generasi keempat dengan melakukan berbagai antisipasi. Fahami lebih mendalam tentang perang generasi ke empat, strategi dan penerapannya, sebelum semuanya menjadi terlambat. Karena waktu terus bergulir dan para aktor semakin banyak

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

bergentayangan. Nasionalisme harus terus digelorakan, demi terjaganya keberadaan WNI yang bermartabat yang selalu ikut menjaga dan memper-tahankan negara bangsanya agar semakin jaya dalam bingkai NKRI sampai kapanpun. Globalisasi, telah mempertautkan antara kerja sama dan kompetisi yang kemudian menghadirkan skenario baru dalam hubungan internasional yang dikenal dengan nama perang asimetris. Dampak globalisasi dihadapkan kepada perang generasi ke empat lebih banyak negatifnya daripada pengaruh positifnya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif terhadap nilai Nasionalisme agar perang generasi keempat ini dapat diatasi dan dampak kehancuran terhadap NKRI seminimal mungkin yakni :

- 1) Aparat teritorial beserta masyarakat bersama-sama bahu membahu menumbuhkan semangat Nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri.
- 2) Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, sehingga akan mewujudkan rakyat Indonesia yang berkarakter Pancasila.
- 3) Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik- baiknya.
- 4) Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
- 5) Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa, informatika teknologi dan keselamatan umum.
- 6) Pemahaman kewaspadaan nasional harus disosialisasi secara formal maupun non formal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

- 7) Dalam kerangka sosialisasi, aplikasi dan evaluasi pelaksanaan kewaspadaan nasional, diupayakan melalui metode-metode interaktif yang tidak monoton, menarik, berkesan dan memberikan nilai tinggal di hati dan pikiran seluruh bangsa Indonesia.
- 8) Pembangunan kewaspadaan nasional harus berpedoman pada asas pelibatan masyarakat, terarah, terpadu dan komprehensif di seluruh komponen bangsa.
- 9) Meningkatkan kekuatan militer untuk Pertahanan Negara Kepulauan untuk menjaga 17.504 pulau dengan 300 etnis dan terpisah antar pulau dengan begitu banyak kekayaan di dalamnya. Sekaligus mempertajam jati diri dan identitas bangsa agar menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan tanpa berfikir secara sektoral.
- 10) Meningkatkan perekonomian rakyat sehingga jika militer Indonesia diperkuat maka tidak banyak rakyat yang menderita kelaparan karena anggaran yang besar digunakan untuk militer.
- 11) Meningkatkan anggaran pertahanan dan setiap pembelian alutsista dilakukan dengan sistem G to G untuk mengurangi pengambilan keuntungan yang besar oleh pihak vendor sehingga pembelian alutsista dapat lebih optimal.
- 12) Kemampuan untuk bertahan dan memberikan serangan balik terhadap segala macam ancaman yang mengganggu dan membahayakan NKRI dari segi informasi dan *psycowar*. Kita bisa belajar banyak dari revolusi di Mesir dan Libya dimana informasi dan *psycowar* memerankan faktor yang cukup besar dalam penggalangan opini publik.

13) Mensosialisaikan investasi dalam bidang pertahanan adalah sangat menguntungkan bangsa ini. Karena kita mengetahui bahwa berapa triliun rupiah kerugian negara yang disebabkan oleh pelanggaran perbatasan, pencurian kekayaan alam dan pencurian ikan yang disebabkan terlalu banyak tempat yang belum terjaga di segala sudut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14) Memanfaatkan GSO (*Geo Stationery Orbite*) sebagai aset pertahanan. Peralatan perang mutakhir saat ini sangat tergantung oleh satelite baik untuk mengetahui cuaca daerah operasi maupun penggunaan GPS (*Global Positioning System*). GPS buatan Amerika Serikat yang sering kita gunakan saat ini sengaja di *setting* dengan error 0,1 Nm oleh negara pembuatnya. Jika kita bisa memanfaatkan wilayah Indonesia yang terletak di equator bumi dan memiliki jarak terdekat dengan GSO di dunia ini maka GSO ini sesungguhnya aset militer yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

15) Membuat suatu pakta pertahanan militer dalam tingkat ASEAN, sehingga jika didalam pakta pertahanan militer tersebut dapat disepakati bahwa sepakat untuk saling menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah sesama negara ASEAN, maka akan sangat mengurangi *effort* penjagaan wilayah yang sangat luas tersebut.

BAB V PENUTUP

22. Kesimpulan.

a. Arah dan sasaran pembangunan kekuatan pertahanan Negara Indonesia bukan untuk memperbesar kekuatan, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan (*filling the gap*) yaitu pembangunan kekuatan pertahanan lebih difokuskan untuk membangun kekuatan TNI minimum yang diperlukan (*Minimum Required Essential Force*). *Minimum Required Essential Force* dimaksud adalah kekuatan dan kemampuan TNI yang diperlukan untuk mengatasi ancaman keamanan yang bersifat mendesak. Sejalan dengan upaya membangun TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara, pembangunan komponen cadangan dan pendukung juga dilakukan secara bertahap. Kebijakan *Minimum Required Essential Force* dihadapkan dengan karakteristik perang generasi keempat, TNI AD sebagai bagian dari komponen utama dari pertahanan Negara harus dapat menciptakan kekuatan kewilayahan yang dapat diandalkan, sehingga secara nyata tercipta daya tangkal terhadap pengaruh negatif dan berpotensi sebagai ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, sekaligus secara langsung maupun tidak langsung mendukung program pembangunan kekuatan TNI AD yang siap digunakan bila diperlukan.

b. Keterlibatan unsur komando kewilayahan sesuai dengan UU TNI nomor 34 tahun 2004 harus dapat dioptimalkan yaitu sesuai pasal 7 ayat 2 b dimana TNI memiliki andil dalam tugas pokok OMSP (Operasi Militer Selain Perang) diantaranya yang dapat diserahkan kepada komando kewilayahan adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Dalam mewujudkan harapan tersebut di atas maka organisasi komando kewilayahan sudah selayaknya dilengkapi struktur organisasinya baik personel maupun peralatannya

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

agar selalu siap melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya mekanisme tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan secara politik dari elemen bangsa lainnya.

c. Kodam sebagai kompartemen strategis menggunakan wilayah untuk kepentingan militer, bertanggungjawab atas keselamatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, maka gelar kewilayahan saat ini menggunakan strategi pertahanan darat yaitu strategi pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Dengan perbandingan luas wilayah tanggungjawab dan personel yang tersedia maka masih terdapat titik lemah di beberapa Kodam terutama permasalahan dalam rentang kendali dan rantai komando sehingga akan sulit untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh dan berpengaruh langsung terhadap kemampuan serta batas kemampuan Kodam. Oleh sebab itu perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan/penyesuaian personel satuan kewilayahan dan adanya penambahan Kodam baru di Provinsi Papua Barat dan Kodam bentukan baru di Sulawesi bagian utara, pembentukan Brigade di wilayah Kodam Iskandar Muda, Kodam II/Sriwijaya, Kodam XII/Tanjungpura dan Kodam XVII/Cendrawasih sesuai dengan MEF TNI AD tahun 2010-2029 dalam rangka penanganan konflik sosial dan komando pengendalian.

d. Ancaman pada perang generasi keempat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, mengingat pada perang ini tidak melibatkan perang secara konvensional atau tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini lebih bersifat nir militer seperti separatisme, terorisme, obyek vital, VVIP, konflik SARA, kejahatan lintas negara, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi dan keselamatan umum, sehingga apabila dihadapkan dengan perang generasi keempat dikaitkan dengan gelar satuan teritorial sudah cukup memadai meskipun demikian perlu adanya beberapa penyesuaian organisasi yang dititikberatkan pada evaluasi

Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Ke Empat

validasi organisasi yang telah ada dan personel yang profesional.

23. Rekomendasi.

a. Meskipun kebijakan *Minimum Required Essential Force* merupakan salah satu strategi TNI guna meningkatkan kekuatan kewilayahan, namun perlu adanya penambahan satuan (personel diambil dari Satpur, Satbanpur, Balakpus dan Kotama yang kurang efektif) yang ditempatkan di wilayah yang sangat strategis sehingga secara nyata tercipta daya tangkal terhadap pengaruh negatif dan berpotensi sebagai ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia diantaranya, penambahan Kodam baru di Provinsi Papua Barat dan Sulawesi bagian utara dan perlu adanya percepatan pembentukan Brigade di wilayah Kodam Iskandar Muda, Kodam II/Sriwijaya, Kodam XII/Tanjungpura dan Kodam XVII/Cendrawasih serta penambahan satuan Koramil dan personel Babinsa dalam rangka menghadapi perang generasi keempat.

b. Dalam peran dan gelar satuan teritorial perlu perencanaan validasi organisasi dan sumber daya manusia profesional serta adanya revisi buku petunjuk penyelenggaraan satuan teritorial dari tingkat Kodam sampai dengan Kodim guna menunjang tugas pokok TNI untuk menghadapi perang generasi keempat.

Bandung, Juni 2013
Komandan Seskoad

Ir. Arief Rachman, M.B.A., M.M
Jenderal TNI